

PERAN PEMERINTAH DALAM KENAIKAN AKREDITASI RUMAH SAKIT BERPENGARUH PADA MUTU PELAYANAN

Edward Haryadi

Universitas Sriwijaya, Indonesia

*edh121278@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit Pasal 1 Ayat 1 Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. Akreditasi Rumah Sakit tetap dibutuhkan karena bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dalam bidang kesehatan. Dijelaskan dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit Pasal 3 Ayat 2 kenaikan akreditasi Rumah Sakit dilakukan setiap 4 tahun sekali pada saat Akreditasi tersebut habis masa berlakunya. Komponen-komponen mutu yang berpengaruh dalam kenaikan akreditasi Rumah Sakit adalah sumber daya manusia, anggaran, pengawasan, sosialisasi akreditasi dan SOP maka akreditasi rumah sakit tidak akan turun bahkan bisa cepat mengalami peningkatan akreditasi. Rumusan masalah membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam kenaikan akreditasi rumah sakit berpengaruh pada mutu pelayanan, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam kenaikan akreditasi rumah sakit berpengaruh pada mutu pelayanan. Metode penelitian yang di gunakan yaitu normative. Pemerintah juga sangat berperan dalam peningkatan akreditasi ini seperti membantu dalam fasilitas, perubahan regulasi yang mengarah ke lebih baik. Saran yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus segera menjalankan peran-perannya tersebut agar Rumah Sakit di Indonesia dapat maju dalam pelayanan kesehatannya sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan dengan nyaman.

Kata Kunci: Akreditasi; Hubungan; Hukum; Mutu; Pelayanan

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia semakin tinggi, untuk pelayanan kesehatan sendiri pemerintah telah menyediakan pelayanan kesehatan seperti puskesmas, RSD maupun RS kota. RS termasuk pelayanan kesehatan dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah seperti dijelaskan dalam UU Nomor Tiga Puluh Enam Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal Dua Puluh Enam Ayat Dua menjelaskan tentang PerDa dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerahnya, Ayat tiga menjelaskan tentang Pengelolaan dan Penadayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat dua dilakukan dengan memperhatikan (a) Macam-macam Lembaga Kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, (b) Jumlah sarana dan (c) Jumlah tenaga kesehatan.¹ Institusi pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan manusia yaitu Rumah Sakit. Didalam Undang-Undang RI No. Empat Puluh Empat Tahun 2009 Tentang RS Pasal satu Menerangkan bahwa RS adalah instansi pelayanan kesehatan untuk maupun perorangan ataupun kelompok tertinggi yang menyediakan pelayanan rawat inap,

¹ UU RI No. 36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*, Pub. L. No. UU RI No. 36 Tahun 2009, 5 12 (2009).

rawat jalan, dan gawat darurat.² Rumah sakit pun memiliki dua jenis-jenis rumah sakit, yaitu:

Tabel I Jenis-Jenis RS

Jenis-Jenis Rumah Sakit	
RS Publik	RS Privat

- **Rumah Sakit Publik**

Lembaga kesehatan yang ditata perda dan instansi hukum (*Non-Profit*) dimana sumbangan tidak dapat digunakan sehingga tidak dapat menghasilkan barang/jasa dan tidak menuntut laba sosial sehingga yang berobat kalangan kelas bawah karena peraturan birokrasi terhadap pelayanan sehingga seluruhnya tidak sama dengan RS Privat.

- **Rumah Sakit Privat**

Lembaga hukum yang memiliki tujuan nirlaba dalam bentuk perseroan terbatas. Berdirinya RS memiliki tujuan, tugas dan fungsi. Menurut UU RS Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RS Pasal Tiga Menjelaskan tentang tujuan Rumah Sakit yang dimana RS bertujuan untuk (a) Memberikan keluasaan jalan masuk masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, (b) Memberikan perawatan yang bertujuan untuk keselamatan pasien (c) Memajukan kualitas serta menjalankan aturan umum; dan (d) Membagikan solusi secara hukum untuk seluruhnya. Untuk fungsi dari RS yaitu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara sempurna pasal empat.

Dan Pasal lima menjelaskan tentang tugas Rumah sakit: (a) Penyelenggaraan terapi standar pelayanan; (b) Penjagaan dan peningkatan kesehatan. (c) Adanya pelatihan SDM. (d) Pengelolaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.³ Sejarah rumah sakit pada awalnya adalah memberikan suatu fasilitas dan mutu terhadap pelayanan kesehatan sehingga kesehatan masyarakat dapat terjamin namun adanya kemajuan RS Swasta maupun RS Negeri dianggap sebagai pelayanan kesehatan pabrik yang manajemen pengurusannya tidak berbeda dengan badan usaha yang berorientasi ekonomi sehingga berpengaruh pada peningkatan akreditasi namun hingga saat ini masih banyaknya rumah sakit yang belum mengalami peningkatan akreditasi karena mengalami beberapa tantangan, tantangan-tantangan tersebut harus segera disingkirkan agar rumah sakit bisa cepat mengalami peningkatan akreditasi yang dimana nantinya rumah sakit yang telah mengalami peningkatan akreditasi dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi bahkan situasi perekonomian dan perkembangan serta meningkatkan pelayanan rumah sakit yang lebih berkualitas serta membangun IPE lebih baik lagi.⁴

² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 *Tentang Rumah Sakit*, 26 551 (2009).

³ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 *Tentang Rumah Sakit*, 26 551 (2009).

⁴ Hendroyogi, S. R., & Harsono, M. (2017). Keterkaitan Antara Persepsi Pentingnya Akreditasi Rumah Sakit Dengan Partisipasi, Komitmen, Kepuasan Kerja, Dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 18(2), 122. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v18i2.4509>

Pengertian Akreditasi Rumah Sakit pun telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit Pasal 1 Ayat 1 Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. Pasal 3 Ayat 2 menjelaskan bahwa kenaikan akreditasi RS dilakukan setiap 4 tahun sekali pada saat Akreditasi tersebut habis masa berlakunya. Rumah Sakit yang telah memiliki Akreditasi harus mempertahankan atau meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit bila perlu adanya kerja sama dengan pemerintah seperti kebijakan yang mendorong RS baik milik pemerintah untuk terus berbenah diri. Regulasi dari pemerintah di persempit dan diperluas relasinya sehingga berpengaruh pada kemajuan manajemen dan dapat mencari strategi yang tepat dalam mengembangkan sarana dan prasarana RS agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat di era disruptif. Sehingga peningkatan akreditasi cepat berjalan yang tentunya berpengaruh pada peningkatan mutu yang baik dalam pelayanan kesehatan karena mutu Pelayanan Rumah Sakit juga sangat berpengaruh pada beberapa komponen, seperti sumber daya manusia, anggaran, pengawasan, sosialisasi akreditasi, SOP, serta pemerintah juga berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai jaminan atas hak kesehatan orang miskin atau kurang mampu.⁵ Jika mutu pelayanan Rumah Sakit telah terpenuhi dan terealisasi dengan baik mulai dari sumber daya manusia, anggaran, pengawasan, sosialisasi akreditasi dan SOP maka akreditasi rumah sakit tidak akan turun bahkan bisa cepat mengalami peningkatan akreditasi. Akreditasi juga memiliki tujuan seperti dapat meningkatnya mutu, mendapat pandangan baik terhadap rumah sakit mengenai sumber daya manusianya, rumah sakit semakin ramai pasien, menjadi rumah sakit yang bagus, dan memberikan manfaat pemasukan keuangan rumah sakit semakin memadai sehingga dapat menutupi sesuatu yang kurang dalam RS atau struktur management RS dapat berjalan dengan baik. Harus diberikan solusi dalam hal ini agar peningkatan akreditasi rumah sakit semakin membaik seperti pemerintah maupun swasta dalam melakukan berbagai perombakan atau perubahan pada rumah sakit yang dimiliki tidak hanya untuk bagian dari upaya agar lolos akreditasi saja namun juga hal lainnya juga perlu dirubah seperti meningkatkan kepuasan konsumen seperti masyarakat sebagai klien penerima layanan sehingga ketika akreditasi rumah sakit meningkat baik klien atau masyarakat merasa puas dan senang atas pelayanan rumah sakit tersebut. Maka dari itu penulis akan membahas ini secara detail melalui artikel atau jurnal ini.

⁵Kusumaningrum.,A.,E.,Erwaningsih.,Dewi.,N.,P.,Asriwati.,Ismaniar.,H.,Magfirah.,Umniyatun.,Y.,Nurmansyah.,M.,I.,Hadi.,I.,Alaydrus.,Syafika,Syamsurriansyah.,Siregar.,R.,A.,Darmayani.,S.,(2020), *Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, Cetakan Pertama Edisi Pertama, Hlm.1.

B. METODE

Metode penelitiannya yaitu yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi penelitian dan hukum. Bahan Primer meliputi Bahan pustaka merupakan data dasar digolongkan sebagai data sekunder dari jurnal atau artikel dan Bahan Tersier Terkait dengan Perkembangan kasus yang dibahas dan digabung dengan perspektif dari sudut pandang peneliti. Sehingga penelitian ini bisa dikatakan valid.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

a. Pembahasan Tentang Peran Pemerintah Dalam Kenaikan Akreditasi Rumah Sakit

Kesehatan adalah hal penting bagi manusia, manusia maupun makhluk hidup lainnya berhak mendapatkan hak untuk sehat. Dilihat dalam bentuk SDM yang membagikan kemampuan individu, dan publik bertujuan dalam menambah skill mengolah hingga merubah pola hidup, dan lingkungan untuk menuju paradigma sakit menuju paradigma sehat. Terbentuknya layanan kesehatan sangat penting bagi keadaan kesehatan pasien dalam suatu masalah yang dialami. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga melalui sistem pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga atau publik, jasa publik, dan pelayanan administratif dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam sebuah pelayanan ini adalah suatu syarat untuk meningkatkan mutu suatu bangsa. Pelayanan Kesehatan yang baik dasarnya dengan memetakan pemahaman mengenai peran dan makna pelayanan dalam dinamika masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh delapan H ayat satu atau dapat disingkat menjadi UU RI 1945 Pasal 28 bagian H Ayat Satu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan Pasal tiga puluh empat ayat tiga "Negara

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Pelayanan kesehatan sendiri dilaksanakan seperti dirumah sakit yang berkepentingan pada kebutuhan kesehatan public atau masyarakat. Menurut Azwar tujuan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit:

1. Promotif.
2. Penangkisan resiko penyakit terhadap:
 - a) Program pendidikan, seperti imunisasi, dan lain-lain.
 - b) Pengobatan penyakit pada tahap awal untuk membatasi kecacatan dengan cara mengindari akibat yang muncul dari deretan penyakit yang diderita.

- c) Melakukan pemeriksaan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi, analisis dan pengobatan.
3. Penyembuhan Penyakit
Berpengaruh pada golongan obat yang digunakan karena menentukan kualitas terapi juga semakin bagus golongan obat yang digunakan semakin bagus juga terapi yang didapat dan semakin cepat juga proses Kuratif atau penyembuhan penyakitnya.
4. Perbaikan
Usaha pemulihan dalam mencapai fungsi normal atau mendekati normal setelah mengalami sakit fisik atau mental.⁶

Sehingga tujuan-tujuan tersebut harus diterapkan dalam manajemen rumah sakit yang nantinya berpengaruh pada akreditasi rumah sakit. Manajemen pelayanan kesehatan rumah sakit tidak dapat berjalan sendiri, dibutuhkan tiga faktor pendukung utama yaitu: 1. Setara dengan layanan saat ini. 2. Kesamaan dengan perjalanan ada saat ini 3. Pemantauan finansial: implementasi sebuah pelayanan baru memakan biaya yang harus difikirkan Dan juga ditambah factor tambahan berupa (*interrelationships*). *Interrelationships* dikelompokan dalam dua kelompok besar sebagai berikut:

1. Manajer dan faktor-faktor pendukung manajemen lainnya.
2. Fungsi manajemen pengorganisasian staf yang sesuai, dapat diterapkan di bidang kesehatan agar membantu menyelesaikan kasus kesehatan masyarakat dengan tujuan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.⁷

Selain itu dukung dengan factor lain juga untuk meningkatkan pelayanan kesehatan seperti iklan kesehatan dapat dilakukan untuk rumah sakit jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pembelaan dihasilkan keputusan yang menyangkut kebijakan yang berkaitan dengan : kabupaten/kota sehat, Selain itu sekitar 20 provinsi juga telah mengedarkan Surat Edaran yang berkaitan dengan penanggulangan AIDS, dan lain-lain.
2. Pembentukan budaya hidup bugar.
3. Pengembangan tindakan lingkungan sehat, 53 ribu lebih yang telah menjalankan program lingkungan sehat.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dengan memberikan kegiatan, sosialisasi Indonesia Sehat organisasi kemasyarakatan, berbagai pertemuan Organisasi Profesi.
5. Memberikan arahan tentang kesehatan.
6. Pengembangan iklan kesahatan.

⁶ Sari, R. S., & Fatihah, D. C. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 5(2), 124–135. <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i4.1538>

⁷ Manurung, J., Novela, V., Ulfiana, Q., Simamora, J. P., Argaheni, N. B., Sianturi, E., Saeni, R. H., & Lakhmudien. (2021). *Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan* (J. Simarmata (ed.); Issue September). Yayasan Kita Menulis. kitamenulis.id.

7. Pengembangan media.
8. Kemajuan infrastruktur.⁸

Rumah Sakit yang telah beroperasi wajib memiliki standar regulasi yang baik, seperti akreditasi rumah sakit. Dalam pembentukan akreditasi tentunya penggolongan rumah sakit juga menentukan dalam pelayanan kesehatan, Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, diklasifikasikan sebagai berikut A,B,C,D, dan D Pratama. Penentuan klasifikasi RS ada 3 aspek utama, yaitu pelayanan; SDM, alat sampai prasarana. Akreditasi adalah keharusan terhadap pelayanan memberikan dorongan semua rs dalam merealisasikan rencana tersebut, pemerintah pun mewejangi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung rumah sakit yang ada di daerahnya. Semakin naiknya akreditasi RS semakin banyak mendapatkan manfaat antara lain: lebih memahami keluhan dan saran dari pasien. Di samping itu rumah sakit juga akan berusaha menghormati hak-hak pasien dan melibatkan pasien dalam proses perawatan sebagai mitra. Dalam hal ini kementerian kesehatan menargetkan pada tahun dua ribu empat belas RS di Indonesia sudah terakreditasi, minimal terakreditasi nasional, tetapi hingga tahun dua ribu enam belas baru dua ratus delapan puluh empat persen rumah sakit yang terakreditasi di Indonesia.⁹

Sehingga masih banyaknya komponen-komponen penunjang maupun pendukung yang harus diperbaiki demi menaikka akreditasi. Akreditasi Rumah Sakit pun telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Dua Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tentang Akreditasi RS Pasal Satu Ayat Satu Akreditasi RS yang selanjutnya disebut pengakuan terhadap mutu pelayanan RS, setelah dilakukan penilaian memenuhi Standar Akreditasi. Akreditasi rs pun baru bisa didapat apa bila rumah sakit tersebut telah beroperasi selama dua tahun, seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Dua Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tentang Akreditasi Rumah Sakit Pasal Tiga Ayat Tiga Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan oleh RS Paling lambat setelah beroperasi dua tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali dan pada Pasal Dua menjelaskan bahwa peningkatan akreditasi Rumah Sakit dapat dilakukan Empat tahun sekali setelah masa berlaku habis (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020).¹⁰ Komisi Akreditasi RS merupakan suatu lembaga independen dalam negeri sebagai pelaksana akreditasi RS yang bersifat fungsional dan non-struktural. Survei Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh KARS akan meliputi beberapa hal sebagai berikut yaitu: pemeriksaan berkas, interview tentang pelaksanaan sop, *on site observasi* pelayanan, serta edukasi tentang

⁸ Adventus, Jaya, I. M. M., & Mahendra, D. (2019). Buku Ajar Promosi Kesehatan. In *Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Fakultas Vokasi UKI*. Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Fakultas Vokasi UKI.

⁹ Mandawati, M., Fu'adi, M. J., & Jaelan, J. (2018). Dampak Akreditasi Rumah Sakit: Studi Kualitatif Terhadap Perawat Di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo. *Nurscope : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 4(4), 23. <https://doi.org/10.30659/nurscope.4.1.23-29>.

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit, Pub. L. No. PERMENKES RI No.12 Tahun 2020, 4 1 (2020).

pemenuhan *performance improvement*. Di sini dapat digambarkan bahwa hukum pemerintah dan hukum akreditasi Rumah Sakit juga sangat penting dalam melakukan peran terhadap peningkatan Akreditasi Rumah sakit tentunya adanya kerja sama pemerintah di setiap Rumah Sakit di Indonesia baik swasta maupun negeri. Peran-peran pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit agar kenaikan akreditasi dapat berjalan dengan lancar, seperti berikut:

1. Menambah fasilitas pelayanan kesehatan, memelihara kesehatan, meningkatkan terapi serta penyembuhan kesehatan, selain tanggung jawab pemerintah juga merupakan hak bagi masyarakat untuk ikut berperan serta.
2. Adanya regulasi dalam peran agar berjalan optimal. Aktifitas regulasi secara umum pemberian izin, akreditasi dan sertifikasi.¹¹

Banyak faktor yang mempengaruhi Akreditasi rumah sakit faktor utamanya adalah mutu pelayanan kesehatan. Pengertian dari mutu pelayanan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar operasional instansi kesehatan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia.¹² Mutu pelayanan kesehatan pun sangatlah menentukan kualitas rumah sakit sehingga pada saat penetapan maupun peningkatan suatu akreditasi rumah sakit faktor penilaian utama, semakin baik mutu pelayanan rumah sakit maka semakin cepat akreditasi meningkat ataupun sulit untuk mengalami penurunan akreditasi. Disisi lain mutu pelayanan kesehatan juga memiliki komponen-komponen lainnya yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Semakin banyak Sumber Daya Manusia kesehatan yang dibutuhkan dan bekerja di Rumah Sakit dengan kualitas SDM yang baik maka Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit untuk masyarakat dapat terpenuhi dengan sangat baik sehingga dengan mudah untuk meningkatnya akreditasi ataupun susahny akreditasi untuk turun. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bidang kesehatan sangatlah berpengaruh pada mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

a. Anggaran

Dalam penyusunan dan pengelolaan suatu anggaran dalam institusi kesehatan seperti Rumah Sakit sangatlah berpengaruh dalam Akreditasi Rumah Sakit. Ketika Anggarannya baik dalam pengelolaan maupun penyusunannya maka Akreditasi dapat ditegakkan dengan baik pula tapi jika pengelolaan maupun penyusunan aggaran tersebut buruk maka Akreditasi akan tertunda untuk mendapatkan izin atau bahkan bisa menurun untuk Rumah Sakit yang telah memiliki akreditasi. Seperti pendapat dari Anrian.,M mengatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan kerja tidak terlepas dari yang

¹¹ Munthe, A. P. R. F. (2019). *Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit sesuai Dengan Akreditasi Di Rumah Sakit*. 159, <https://manajemenrumahsakit.net/2019/06/meningkatk.https://manajemenrumahsakit.net/2019/06/meningkatkan-mutu-pelayanan-rumah-sakit-dengan-akreditasi/>

¹² Cahyanti, A. N., & Purnama, B. E. (2021). Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Pakis Baru Nawangan. *Speed Journal – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 4(4), 17–21. <https://doi.org/10.3112/SPEED.V4I4.893>

namaya biaya atau dana begitu juga dengan pelaksanaan strategi peningkatan status Akreditasi Rumah Sakit.¹³

b. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelayanan di Rumah Sakit juga sangat berpengaruh terhadap Akreditasi Rumah Sakit. Pengawasan Rumah Sakit sangat dibuthkan sebagai rencana kerja dimasa yang akan datang, manajemen kerja yang sedang berjalan, semakin baik pengawasan suatu Rumah Sakit maka semakin efektif pelaksanaan planning yang telah disusun, tetapi jika sebaliknya akan mengakibatkan planning tidak berjalan dengan baik sehingga sangat berpengaruh pada Akreditasi Rumah Sakit. Sosialisasi Akreditasi Dengan Standar Operasional Prosedure

c. Dengan Sosialisasi yang terjalin dengan baik maka SOP nya pun terbentuk dengan baik dan terealisasikan secara baik pula.

Jadi seluruh kompenen mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit sangatlah berpengaruh pada akreditasi rumah sakit. Komponen-komponen tersebut sangatlah berkaitan namun ada komponen utama yang memiliki hubungan dengan mutu pelayanan kesehatan yang menjadi penunjang teratas adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah seseorang atau kumpulan individu yang tak dapat dilepaskan dari suatu organisasi baik institusi maupun perusahaan. Setiap Rumah Sakit sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia yang bergerak dalam sektor kesehatan, semakin banyaknya Sumber Daya Manusia yang bergerak dalam sektor kesehatan didalam suatu Rumah Sakit maka semakin berkualitas Mutu Pelayanan dari Rumah Sakit itu sendiri. Sehingga untuk mempertahankan suatu akreditasi atau meningkatkan suatu Akreditasi lebih cepat teralisasi. Dalam penelitian Sitanggung,R menjelaskan bahwa Akreditasi RS merupakan hal yang wajib dilaksanakan dan diperlukan untuk cara efektif dalam memperbaiki mutu suatu rumah sakit dengan penetapan mutu pelayanan yang sangat diperlukan komitmen, dukungan, dan motivasi dari pemerintah, pimpinanan, dan seluruh SDM yang ada di Rumah Sakit.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa Akreditasi Rumah Sakit sangat ditunjang dan berpengaruh pada dukungan, komitmen maupun motivasi dari berbagai pihak terutama SDM sehingga dapat teralisasi dengan baik. Sebab semakin baiknya suatu penunjang komponen mutu pelayanan kesehatan maka semakin berkualitasnya suatu rumah sakit sehingga dapat dengan cepat mendapatkan akreditasi atau mempertahankan akreditasi itu sendiri. Pembentukan suatu Akreditasi pada Rumah Sakit pun memiliki tujuan, antara lain telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit Pasal 2 menjelaskan bahwa pengaturan Akreditasi bertujuan untuk:

a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit;

¹³ Anrian. M. (2019). Strategi Peningkatan Status Akreditasi Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jom Fisip*, 2(2), 6–8. <https://media.neliti.com/media/publications/32457-ID-strategi-peningkatan-status-akreditasi-rumah-sakit-di-rumah-sakit-umum-daerah-rs.pdf> diakses pada jam 13.48 tanggal 2 november 2022.

¹⁴ Sari, K. J. (2019). *Dampak Positif Akreditasi Rumah Sakit*. 1–6.

Bahwa kenaikan akreditasi sendiri sangat berpengaruh pada peningkatan mutu dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit semakin cepat kenaikan akreditasi di Rumah Sakit maka semakin bagus mutu pelayanannya. Harus memenuhi beberapa kriteria dalam pelayanan agar mutu dalam pelayanan Rumah Sakit ikut bagus di saat kenaikan akreditasi Rumah sakit, antara lain:

1. Keterampilan
Kompetensi untuk mengedukasi pasien.
 2. Daya tanggap
Respon karyawan dalam menolong pasien.
 3. Jaminan
Kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap suatu produk secara cepat, kualitas keramah-tamahan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan sehingga memberikan rasa nyaman, rasa senang dan percaya bagi nasabah dan yang berdampak pada kesuksesan perusahaan layanan jasa.
 4. Perhatian
Ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi dan memahami terhadap Kebutuhan.
 5. Bukti langsung
Meliputi fasilitas yang kasat mata yang dapat dinikmati.¹⁵
- b. Meningkatkan Keselamatan pasien Rumah Sakit
Kenaikan akreditasi juga dapat meningkatkan keselamatan pasien karena didukung oleh sumber daya manusianya yaitu tenaga medis maupun kesehatan yang berkompeten sehingga pelayanan dapat semakin bagus. Semakin bagusnya keselamatan pasien semakin percayanya pasien terhadap rumah sakit tersebut.
- c. Mendukung program Pemerintahan Di Bidang Kesehatan
Peningkatan Akreditasi sendiri bisa bekerjasama dengan pemerintah ini kebijakan dari pemerintah. Maka dari itu perlu dilakukan kerjasama sehingga peningkatan akreditasi ini bisa berjalan dan terimplementasi dengan baik sehingga Rumah Sakit di Indonesia secara universal lengkap dan bagus sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia tercinta.
- Solusi agar Akreditasi tetap baik ataupun meningkat maka komponen-komponen mutu pelayanan kesehatan harus terealisasi dengan baik terlebih dahulu sehingga prosedur Rumah Sakit yang telah disusun bisa diterapkan dengan baik juga. Sehingga usaha awal tidak sia-sia jika akreditasi dapat dipertahankan ataupun bisa ditingkatkan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.¹⁶ Kenaikan akreditasi Rumah Sakit juga dapat memberikan dampak positif antara lain:

¹⁵ Nasution, J. (2018). Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(1), 68–81.

¹⁶ Putri, A. (2017). Kesiapan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit 10.18196/Jmmr.2016*, 6(1), 55–60. <https://doi.org/10.18196/jmmr.6127>.

- 1) Memberikan program akreditasi karena strategi yang efektif untuk menjamin mutu, kinerja organisasi menjadi lebih baik setelah akreditasi.
- 2) Akreditasi memberikan Perubahan dalam organisasi kesehatan seperti perubahan administrasi dan manajemen, review systems, organisasi staf medis, layanan keperawatan, memperkenalkan mengenai program mutu yang berkesinambungan, peningkatan kualitas pada pedoman klinis.
- 3) Sosialisasi hasil laporan akreditasi yang bertujuan mengetahui asosiasi positif antara skor akreditasi dan pengungkapan ke publik mengenai laporan akreditasi rumah sakit (Sari, 2019).¹⁷ Kualitas terapi yang baik sangat menentukan juga baik tidaknya kualitas kesehatan pasien yang berpengaruh pada peningkatan akreditasi. Kualitas terapi dilihat berdasarkan hasil assessment dan education pasien, dan juga perlu ditambahkan terapi non-farmakologi karena berbagai model terapi kognitif telah menunjukkan keberhasilan dari terapi itu sendiri sehingga dapat terlihat perubahan dari perilaku yang signifikan yang dapat menyentuh aspek fisiologis dan psikologis pasien.

D. PENUTUP

Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa hubungan hukum pemerintah dengan hukum akreditasi Rumah Sakit ada hubungannya untuk meningkatkan akreditasi Rumah sakit dengan implementasi nya cepat. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Dua Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tentang RS Pasal Tiga Ayat Dua menjelaskan bahwa peningkatan akreditasi Rumah Sakit dapat dilakukan Empat tahun sekali setelah masa berlaku habis. Hubungannya dengan Hukum pemerintah adalah memberikan kerja sama terhadap Rumah Sakit yang ada di Indonesia baik swasta maupun negeri dengan memberikan suatu peran-peran pemerintah dalam menaikkan akreditasi Rumah Sakit seperti berikut Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, Diperlukan regulasi agar peran ini dapat berjalan optimal. Sehingga Implementasi dalam kenaikan akreditasi menjadi lebih cepat. Untuk naiknya suatu akreditasi Rumah Sakit maka sangat mempengaruhi komponen-komponen pendukung terutama komponen SDM, semakin banyak Sumber Daya Manusia kesehatan yang dibutuhkan dan bekerja di Rumah Sakit dengan kualitas SDM yang baik maka Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit untuk masyarakat dapat terpenuhi dengan sangat baik sehingga dengan mudah untuk meningkatnya akreditasi ataupun susahnya akreditasi untuk turun dan Anggarannya baik dalam pengelolaan maupun penyusunannya maka Akreditasi dapat ditegakkan dengan baik pula tapi jika pengelolaan maupun penyusunan anggaran tersebut buruk maka Akreditasi akan tertunda untuk mendapatkan izin atau bahkan bisa menurun untuk Rumah Sakit yang telah memiliki akreditasi. Pengawasan Rumah Sakit sangat dibutuhkan sebagai rencana kerja dimasa yang akan datang, manajemen kerja yang sedang berjalan,

¹⁷ Amin, Y. (2017). Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan. In *Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan* (Vol. 7, Issue 1). Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

semakin baik pengawasan suatu Rumah Sakit maka semakin efektif pelaksanaan planning yang telah disusun, tetapi jika sebaliknya akan mengakibatkan planning tidak berjalan dengan baik sehingga sangat berpengaruh pada Akreditasi Rumah Sakit. Sosialisasi Akreditasi Dengan Standar Operasional Prosedure Dengan Sosialisasi yang terjalin dengan baik maka SOP nya pun terbentuk dengan baik dan terealisasikan secara baik pula. Seluruh komponen-komponen pendukung diatas jika terealisasikan dengan baik maka kenaikan akreditasi rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Dan dapat memberikan dampak positif bagi rumah sakit antara lain Sikap para profesional terhadap akreditasi tidak sama, Akreditasi mendorong Perubahan dalam organisasi kesehatan, Sosialisasi hasil aporan akreditasi meningkatkan kredibilitas RS.

Saran yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus segera menjalankan peran-perannya tersebut agar Rumah Sakit di Indonesia dapat maju dalam pelayanan kesehatannya, dan perlu bekerja sama dengan rumah sakit untuk meningkatkan komponen-komponen mutu diatas sehingga akreditasi cepat meningkat dan memberikan dampak positif terhadap rumah sakit maupun masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaningrum.,A.,E.,Ervaningsih.,Dewi.,N.,P.,Asriwati.,Ismaniar.,H.,Magfirah.,Umniyatun.,Y.,Nurmanasyah.,M.,I.,Hadi.,I.,Alaydrus.,Syafika,Syamsurriansyah.,Siregar.,R.,A.,Darmayani.,S.,(2020) *Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, Cetakan Pertama Edisi Pertama.
- Adventus, Jaya, I. M. M., & Mahendra, D. (2019). Buku Ajar Promosi Kesehatan. In *Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Fakultas Vokasi UKI*. Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Fakultas Vokasi UKI.
- Amin, Y. (2017). Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan. In *Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan* (Vol. 7, Issue 1). Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf
<https://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625>
- Anrian. M. (2019). Strategi Peningkatan Status Akreditasi Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jom Fisip*, 2(2), 6–8.
<https://media.neliti.com/media/publications/32457-ID-strategi-peningkatan-status-akreditasi-rumah-sakit-di-rumah-sakit-umum-daerah-rs.pdf>
- Cahyanti, A. N., & Purnama, B. E. (2021). Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Pakis Baru Nawangan. *Speed Journal – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 4(4), 17–21.
<https://doi.org/10.3112/SPEED.V4I4.893>
- Hendroyogi, S. R., & Harsono, M. (2017). Keterkaitan Antara Persepsi Pentingnya Akreditasi Rumah Sakit

- Dengan Partisipasi, Komitmen, Kepuasan Kerja, Dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 18(2), 122. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v18i2.4509>
- Mandawati, M., Fu'adi, M. J., & Jaelan, J. (2018). Dampak Akreditasi Rumah Sakit: Studi Kualitatif Terhadap Perawat Di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo. *Nurscope : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 4(4), 23. <https://doi.org/10.30659/nurscope.4.1.23-29>
- Manurung, J., Novela, V., Ulfiana, Q., Simamora, J. P., Argaheni, N. B., Sianturi, E., Saeni, R. H., & Lakhmudien. (2021). *Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan* (J. Simarmata (ed.); Issue September). Yayasan Kita Menulis. kitamenulis.id
- Munthe, A. P. R. F. (2019). *Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit sesuai Dengan Akreditasi Di Rumah Sakit*. 159, <https://manajemenrumahsakit.net/2019/06/meningkatk>. <https://manajemenrumahsakit.net/2019/06/meningkatkan-mutu-pelayanan-rumah-sakit-dengan-akreditasi/>
- Nasution, J. (2018). Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(1), 68–81.
- Putri, A. (2017). Kesiapan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit* 10.18196/Jmmr.2016, 6(1), 55–60. <https://doi.org/10.18196/jmmr.6127>
- Sari, K. J. (2019). *Dampak Positif Akreditasi Rumah Sakit*. 1–6.
- Sari, R. S., & Fatihah, D. C. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 5(2), 124–135. <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i4.1538>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit, Pub. L. No. PERMENKES RI No.12 Tahun 2020, 4 1 (2020). <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, 26 551 (2009).
- UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. UU RI No. 36 Tahun 2009, 5 12 (2009). [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydroterrainpreprocessingworkflows.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview_of_Arc_Hydroterrainpreprocessingworkflows.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and_Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww)